

## Apresiasi Kinerja Anies, AHY: Saya Harap Bukan Hanya Jakarta, tapi untuk Indonesia

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam lima tahun menjabat.

AHY sempat berbisik kepada Anies saat menghadiri acara soal pemaparan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (8/10).

"Saya tadi berbisik bahwa tentu ini bukan hanya dirasakan, diapresiasi oleh masyarakat hari ini, tapi juga untuk masa depan," ujar AHY.

Dalam pertemuan itu, AHY mengucapkan selamat ke Anies mengenai pencapaian kinerja selama lima tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Menurut AHY pencapaian Anies di Jakarta saat ini juga bisa diimplementasikan untuk Indonesia.

"Saya berharap, tadi saya sampaikan, bukan hanya untuk Jakarta, tapi pada saatnya

untuk Indonesia," kata AHY.

Seperti diketahui, Anies dan AHY saat ini digadang-gadang bisa menjadi kandidat capres-cawapres yang diusung oleh poros koalisi. Saat ditanyakan mengenai cawapres, AHY mengakui bahwa saat ini Partai Demokrat telah memiliki kedekatan dengan Anies, terlebih memiliki kesamaan visi dan misi.

AHY pun mengamini saat ditanyakan kembali mengenai kesiapannya apabila mendampingi Anies sebagai capres yang telah diusung Partai Nasdem. "Kalau ada doa yang baik, harapan yang baik saya amini aja," kata AHY.

Untuk diketahui, Anies menemui AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (7/10). Sementara itu, Partai Demokrat tengah menjajaki pembentukan koalisi bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, poros koalisi itu hingga kini belum terbentuk. ● han

## Bawaslu Siapkan Komunitas untuk Awasi Medsos Jelang Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sebut bahwa pengawasan pemilu yang mereka lakukan tidak hanya terjun ke lapangan, tetapi juga mengawasi media sosial. Bawaslu bakal meningkatkan sistem pengawasan berbasis internet untuk Pemilu 2024.

"Pemilu tahun 2019 mengajarkan kita (Bawaslu), bahwa literasi digital harus dipahami semua kalangan agar tidak termakan hoaks dan ujaran kebencian," ujar Ketua Bawaslu RI, dikutip keterangan tertulis Bawaslu, Minggu (9/10).

Hal ini disampaikan Rahmat Bagja, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Siber dan Persiapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Bali.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan saat ini, Bawaslu tengah mempersiapkan komunitas digital pengawasan partisipatif.

Ini merupakan langkah Bawaslu untuk mempercepat pengawasan di ruang digital. "Kita punya modal besar untuk keanggotaan komunitas ini, yaitu adanya Sahabat Bawaslu seperti Alumni SKPP, Saka Adhyasta, dan Forum Warga yang akan dibina dalam komunitas yang terbentuk," ujar Lolly.

Sebelumnya, Bagja juga pernah mengklaim bahwa buzzer-buzzer politik di media sosial bakal jadi sasaran pengawasan dan penindakan

jelang Pemilu 2024.

"Betul (buzzer akan ditindak dan diawasi). Itu kan yang paling penting karena itu kan merusak, buzzer ini," ujar Bagja di kantor Bawaslu pada Selasa (14/6) lalu.

Bagja mengungkapkan, penyebaran berita bohong, termasuk konten-konten disinformasi, merupakan salah satu ancaman pemilu yang bakal diantisipasi oleh Bawaslu selain politisasi SARA dan politik uang. Akan tetapi, Bagja mengakui bahwa pengawasan konten disinformasi dan hoaks, termasuk gerak para buzzer yang rata-rata anonim tersebut, bukan pekerjaan gampang.

"Jika ada orang yang melakukan berita bohong, politisasi SARA, dan hoaks, bagaimana hukumnya di media sosial? Pertama kami takedown, tapi susah juga, karena begitu di-takedown 1 muncul 10 lagi," ujarnya.

Bagja menyinggung soal rencana kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, media massa, serta KPU dalam hal literasi digital. Ia mengakui bahwa penegakan hukum terhadap pihak di balik hoaks, disinformasi, dan kerja-kerja buzzer masih lemah.

Bagja menyebut bahwa pihaknya berencana bekerja sama pula dengan kepolisian supaya penindakan tersebut bisa lebih baik.

"Pertama takedown dulu, kami cek belakangnya IP-nya berapa, lapor ke polisi, atau kemudian ke Kominfo," katanya. ● han

# 2 Polhukam

FOTO/ANT



**MENSOS TEMUI KELUARGA KORBAN TRAGEDI KANJURUHAN**  
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyerahkan santunan kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan di Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (8/10). Selain santunan dalam bentuk uang, Mensos memastikan setiap korban dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendapat pendampingan psikolog Kemensos.

## SENGKETA TAMBANG

# Putusan Kasasi Menangkan Perusahaan Tuah Globe Mining Lawan P.T. KMI

Terhitung sejak adanya putusan kasasi yang memangkan PT. TGM, maka perusahaan tersebut tidak ada lagi hubungan apapun dengan PT. KMI.

JAKARTA (IM) - Perusahaan tambang batubara P.T. Tuah Globe Mining (TGM) menang melawan P.T. Kutama Mining Indonesia (KMI) di tingkat kasasi. Dengan demikian, kerjasama dalam bentuk MOU antara TGM dan KMI telah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Perkara perdata ini berawal dari kerjasama antara PT. TGM dan PT. KMI pada tahun 2012, namun KMI sejak 2018 hingga 2019 tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerja sama. Lalu, PT TGM mengajukan gugatan wanprestasi dan menang pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi di Mahkamah Agung.

Onggowijaya selaku kuasa hukum PT. TGM menyambut baik putusan kasasi Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari PT. KMI. Menurut advokat yang akrab disapa Onggo ini, terhitung sejak putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, maka PT. TGM tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan PT. KMI. Selama ini pihak KMI selalu berdalih belum ada putusan yang inkrah.

"Kami meminta semua pihak menghormati putusan pengadilan, jika dulu KMI selalu beralasan belum inkrah maka saat ini tidak ada lagi yang bisa dijadikan alasan PT. KMI membuat narasi lainnya, dan mulai saat ini PT. TGM tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan PT. KMI. Kemudian, PT. TGM akan mulai

melakukan kegiatan penambangan batubara dan menjajaki kerjasama langsung dengan investor besar dari China yang selama ini tertunda karena menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ujar Onggo.

Sebagaimana diketahui, sengketa antara PT. TGM dengan PT. KMI telah bergulir 3 tahun, terhitung sejak tahun 2019. Sekarang, MoU yang pernah dibuat antara PT. TGM dengan PT. KMI batal setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Direktur PT. KMI sebelumnya sudah divonis 3 tahun oleh pengadilan dalam kasus pidana, kasus perdata kalah dan MOU sudah dibatalkan, oleh karenanya kami PT. TGM akan mulai fokus melakukan kegiatan penambangan batubara, dan harapannya tentu adalah agar kegiatan penambangan batubara dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya," ujarnya.

Sementara itu menurut Onggo, pihaknya juga telah melaporkan adanya dugaan

tindak pidana pengrusakan jalan di lokasi tambang yang terjadi pada 12 Juli 2022 ke Kepolisian. Pihak Kepolisian pun telah menangkap aktor intelektualnya.

"Bukan hanya jalan di lokasi tambang PT. TGM yang dirusak, tapi membuat laporan palsu ke polisi oleh oknum salah satu ormas dengan membawa-bawa nama Presiden dan Kepala Staf Kepresidenan. Kami akan menghadap semua persoalan tersebut dan akan membuktikan secara hukum semua tuduhan yang tidak berdasar tersebut, dan apabila ternyata semua tuduhan atau

laporan tersebut tidak benar, maka klien kami PT. TGM akan menempuh upaya hukum tegas terhadap oknum-oknum yang diduga membuat laporan palsu."

"Kami juga telah memiliki bukti-bukti keterlibatan mafia tambang batubara dan nikel berkecaraan di Kalimantan dan Sulawesi, dan dalam waktu dekat akan kami laporkan dan serahkan semua bukti-bukti tersebut ke Bareskrim Mabes Polri untuk ditindaklanjuti secara hukum," kata Onggo dalam keterangan persnya. ● lus

## Lukas Enembe Dikukuhkan sebagai Kepala Suku Besar oleh Dewan Adat Papua

JAYAPURA (IM) - Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan status hukum Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi, namun Gubernur Papua tersebut tetap dicintai rakyatnya.

Terbukti, Dewan Adat Papua (DAP) mengukuhkan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Bangsa Papua di kediaman pribadinya, Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut mengatakan, hal ini merupakan proses organisatoris DAP yang telah menggelar pleno resmi ke sebelas di Jayapura, serta pandangan seluruh pimpinan tujuh wilayah adat di Tanah Papua.

Menurut Sorabut, dalam pembahasan dewan adat tidak melihat Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua, tetapi melihat sepak terjangnya ketika menjabat sejak di pemerintahan terendah hingga menjadi Gubernur.

"Kami tidak disogok oleh siapa-siapa, tetapi terpengaruh nurani untuk ibu pertiwi, sehingga kami datang dan memutuskan bahwa layak seorang Lukas Enembe dijadikan sebagai pemimpin besar tanah dan bangsa Papua atau kepala suku besar tanah dan bangsa Papua," kata Dominikus Sorabut, Minggu (9/10).

Pengukuhan tersebut dilakukan dalam mekanisme pleno Dewan Adat Papua, yang telah diputuskan dan mengikat, secara alam dan Tuhan juga merestui itu. "Kami tidak datang sendiri dimana proses itu kami sudah lakukan secara adat hingga memberikan mahkota sebagai pemimpin besar Papua," katanya.

Menurut Sorabut, sepekan terdahulu Lukas Enembe ketika mengabdikan diri dari pemerintahan terendah sejak masih bertugas di Merauke, wakil Bupati Puncak, Bupati Puncak, lalu Gubernur cukup untuk dia (Lukas Enembe) mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Pengabdian itu tidak bisa diragukan, beliau betul-betul membuktikan bagaimana mencerdaskan anak bangsa, merencanakan pembangunan ke masyarakat adat, membuka isolasi daerah-daerah terjal, mendekatkan pembangunan.

Terlebih adalah sisi pendidikan, katanya, Lukas Enembe selama dalam sejarah bisa keluar anak-anak Papua yang punya potensi berstudi keluar negeri.

Namun, apa yang dibuat

## Waspada, 32 Provinsi Berpotensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

JAKARTA (IM) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini adanya potensi cuaca ekstrem sepekan ke depan, mulai 9 hingga 15 Oktober 2022 mendatang di 32 provinsi di Indonesia.

Sebelumnya, BMKG telah mengeluarkan rilis potensi cuaca ekstrem periode 2 sampai 8 Oktober 2022.

"Berdasarkan analisis terkini bahwa kondisi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia masih cukup signifikan berpotensi mengakibatkan peningkatan potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah dalam sepekan kedepan," ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam keterangan resminya, Minggu (9/10).

BMKG mengatakan dari hasil analisis dinamika atmosfer terkini menunjukkan adanya sirkulasi siklonik yang membentuk pola belokan angin serta perlambatan kecepatan angin yang dapat meningkatkan aktivitas konvektif dan pertumbuhan awan hujan.

"Kemudian aktifnya fenomena gelombang atmosfer seperti MJO (Madden Julian Oscillation) yang berinteraksi dengan gelombang Rossby Ekuatorial dan gelombang Kelvin juga secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan," papar Dwikorita.

Berikut 32 provinsi yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai kilat atau petir

dan angin kencang untuk periode 9 - 15 Oktober 2022 yaitu: Aceh, Sumatra Utara (Sumut), Kepulauan Riau (Kepri), Riau, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan (Sumsel), Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), DI Yogyakarta, Jawa Timur (Jatim), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kemudian wilayah Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. ● han



FOTO:ANT

## MEMPERINGATI HARI CELEBRAL PALSY SEDUNIA

Sejumlah anggota Rumah Cerebral Palsy Indonesia melakukan aksi di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (9/10). Kegiatan itu dalam rangka memperingati hari cerebral palsy sedunia yang diperingati setiap tanggal 6 Oktober dengan tujuan mendukung masa depan anak-anak dan orang dewasa penyandang cerebral palsy memiliki hak akses dan peluang yang sama seperti orang lain.

## Eks Kepala BNPB Ganip Warsito Bergabung ke PDI-Perjuangan

JAKARTA (IM) - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito menyatakan dirinya telah bergabung dengan PDI-P Perjuangan.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara perayaan HUT TNI Tahun 2022 yang diselenggarakan PDI-P di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10).

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri karena telah memberi kesempatan pada saya untuk bergabung dan berjuang bersama-sama dengan PDI-P," ujar Ganip.

Ganip mengungkapkan alasan memilih partai yang

identik dengan lambang banteng tersebut. Ia mengaku memiliki gene PDI-P. Hal tersebut Ganip sadari saat beberapa tahun lalu bertemu dan berbincang-bincang dengan Sekjen PDI-P Hastu Kristiyanto.

"Bicara idealisme, bicara ideologi, bicara nasionalisme, itu kok rasanya ada pada saya. Bicara perjuangan kepada rakyat, itu kok yang selama ini saya lakukan di saat menjabat sebagai prajurit TNI," katanya.

Alhasil pensiunan jenderal bintang 3 TNI itu pun memutuskan bergabung dengan PDI-P. Ganip menegaskan dirinya siap mati untuk partai tersebut. "Sehingga dengan tekad bulat dan tanpa ragu sedikit pun, siap mati untuk PDI-P. Saya bergabung," kata Ganip. ● me



FOTO:ANTARA

**PASSEK KRI BIMA SUCI BERSAMA KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA**  
Awak KRI Bima Suci-945 bersama Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan ke-69 menaikkan bendera isyarat saat pelaksanaan "Flaghoist Exercise" atau latihan isyarat bendera kerek KRI Bima Suci-945 dengan KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 di perairan laut Flores, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (9/10). Dalam Passex tersebut KRI Bima Suci-945 bersama KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 melaksanakan latihan Passing Exercise (Passex) dan Flaghoist Exercise atau latihan isyarat bendera kerek.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	
Komisaris PT Nova Sekuritas Berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diadakan pada:	
Hari/Tanggal:	Senin, 31 Oktober 2022
Waktu:	11:00 WIB
Tempat:	Jl. Tanah Abang II nomor 87F, Cideng Barat, Jakarta Pusat.
Agenda Rapat: 1. Pengangkatan Direksi Baru dan Perubahan Susunan Direksi 2. Pembubaran Perseroan; 3. Dll.	
Jakarta, 10 Oktober 2022 Dewan Komisaris.	